

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penduduk merupakan modal dasar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang baik hanya akan bisa diwujudkan oleh penduduk yang berkualitas baik pula yang belum tentu tergantung pada besar jumlahnya. Jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan yang cepat serta kualitas rendah tentu mempersulit tercapainya tujuan pembangunan dan menimbulkan masalah ledakan penduduk dikemudian hari.

Permasalahan ledakan penduduk merupakan permasalahan penting yang dialami oleh banyak Negara berkembang, termasuk Indonesia. Besarnya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kondisi kesejahteraan yang baik masih menjadi permasalahan pokok di Negara ini.

Menyikapi permasalahan ledakan penduduk, pemerintah Indonesia kemudian fokus menjalankan program Keluarga Berencana (KB). Program KB di Indonesia dimulai sejak masa Orde Baru dan pernah terbukti mampu menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, laju pertumbuhan penduduk pada tahun 1971-1980 adalah 2,31%. Jika dilihat dalam sepuluh tahun berikutnya, angka ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 1,47% pada tahun 1990-2000. Keberhasilan Program KB Nasional Indonesia juga pernah diakui oleh masyarakat luas, termasuk masyarakat Internasional yang ditunjukkan dengan penghargaan Nasional dan Internasional seperti United Nation Population Awards dari Badan Kependudukan Dunia (1987); High Moore Memorial Award dari Population

Crisis Committee/John Hopkins University Amerika Serikat (1989); serta International Management Awards dari Japan Airlines and the ASEAN Institute Of Management, Filipina (1994).<sup>1</sup>

Namun demikian, dalam sepuluh tahun terakhir (tahun 2000-2010) laju pertumbuhan penduduk Indonesia kembali naik dan ini tentu menjadi perhatian penting bagi pemerintah agar lebih serius dalam menjalankan program KB. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 kurang lebih mencapai 237,6 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,49% dan angka Total Fertility Rate (rerata anak yang dilahirkan wanita selama masa usia subur) mencapai 2,41.<sup>2</sup> Artinya, ada penambahan sekitar 3,5 hingga 4 juta penduduk setiap tahun. Dengan pertumbuhan sebesar ini, jumlah penduduk Indonesia di akhir tahun 2014 diperkirakan akan menyentuh 250 juta jiwa.<sup>3</sup>

Sementara itu, angka pengangguran dan kemiskinan masih cukup tinggi. Pada tahun 2012 tercatat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 6,14 % dari total penduduk Indonesia berumur 15 tahun ke atas dan tingkat kemiskinan mencapai 11,6% serta 0,47% penduduk berada di bawah garis kemiskinan.<sup>4</sup> Kondisi ini memperlihatkan besarnya jumlah penduduk Indonesia masih belum diimbangi dengan kondisi kesejahteraan penduduk yang baik.

Upaya untuk terus memaksimalkan pelaksanaan program KB tentu menjadi pilihan mutlak bagi pemerintah saat ini. Pelaksanaan program KB Nasional

---

<sup>1</sup> Jurnal BKKBN, 2003, Peningkatan Partisipasi Pria Dan Kesehatan Reproduksi

<sup>2</sup> Laporan Badan Pusat Statistik Indonesia

<sup>3</sup> Editorial Media Indonesia : Ancaman Ledakan Penduduk dalam <http://www.metrotvnews.com/videoprogram/detail/2013/09/28/19496/121/Ancaman-Ledakan-Penduduk/Editorial%20Media%20Indonesia> (diakses 2 Oktober 2013 pukul 09:33 wib)

<sup>4</sup> Ibid, Laporan Sensus penduduk BPS Indonesia

dimandatkan kepada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atau dulunya bernama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang dibentuk Melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 8 tahun 1970 sebagai sebuah Lembaga Non Kementerian atau dulunya disebut Lembaga Non Departemen. BKKBN merupakan lembaga resmi pelaksana teknis program yang pelaksana kegiatannya terstruktur secara hierarkis dan terkoordinasi mulai dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, hingga Petugas Lapangan KB (PLKB) yang berada di kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Keluarga Berencana dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan dinyatakan sebagai upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pada hakikatnya, program KB memberikan pengertian kepada setiap pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang berkualitas serta terciptanya kesehatan reproduksi pasangan dengan tidak menghilangkan hak-hak reproduksi. Hal ini mengingat program KB bertujuan untuk membentuk keluarga yang seimbang dan berkualitas sehingga setiap pasangan suami istri dituntut agar melakukan perencanaan yang matang dalam menentukan jumlah anak.

Sasaran dari program KB adalah pasangan menikah yang termasuk dalam usia/masa subur atau dikenal dengan Pasangan Usia Subur (PUS). Program KB kemudian diwujudkan dengan penggunaan alat kontrasepsi bagi PUS.

Saat ini, alat kontrasepsi yang tersedia secara umum dalam program KB mencakup IUD, Metode Operasi Wanita (MOW), Kondom, Implan, Suntik,

Metode Operasi Pria (MOP), dan Pil. Alat Kontrasepsi wanita mencakup IUD, MOW, implan, suntik, dan pil. Adapun alat kontrasepsi untuk pria hanya terdiri dari kondom dan MOP.

Penggunaan alat kontrasepsi sebagian besar membutuhkan tenaga ahli kesehatan khusus seperti IUD, Suntik, MOP, dan MOW karena pemasangan alat kontrasepsi ini membutuhkan tindakan medis. Adapun Pil KB bisa didapatkan dengan konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan seperti Bidan, sementara kondom bisa didapatkan lebih mudah karena dijual diberbagai apotek dan minimarket.

Berdasarkan data Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2012, ada 57,9% peserta KB secara modern yang terdiri dari: 3,2% pengguna Medis Operasi Wanita (MOW), 0,2% pengguna Medis Operasi Pria (MOP), 13,6% pengguna pil, 3,9 % pengguna IUD, 31,9% pengguna suntik, 3,3% pengguna implan dan sekitar 1,8% pengguna kondom. Angka ini masih jauh di bawah sasaran strategis BKKBN yang menargetkan pengguna KB modern sebanyak 65% hingga tahun 2014.<sup>5</sup>

**Tabel 1.1 Jumlah Pengguna Alat Kontrasepsi Modern di Indonesia Tahun 2012**

Jenis Alkon	Kontap		Pil	IUD	Suntik	Implan	Kondom	Total Pengguna Alat Kontrasepsi
	MOW	MOP						
Jumlah Pengguna (dalam %)	3,2	0,2	13,6	3,9	31,9	3,3	1,8	<b>57,9</b>

Sumber : Diolah dari Laporan SDKI 2012

<sup>5</sup> Renstra BKKBN Tahun 2010-2014. (Jakarta: 2011)

Penggunaan alat kontrasepsi yang masih belum maksimal di Indonesia diperlihatkan sekitar 42,1% PUS belum ikut KB modern yang terdiri atas: penggunaan kontrasepsi sederhana/tradisional (4%), dan 38,1% sedang tidak menggunakan alat kontrasepsi baik karena dalam kondisi hamil atau ingin anak segera maupun enggan ikut KB meskipun sebenarnya tidak ingin memiliki anak segera atau bahkan tidak menginginkan anak lagi ( Unmet Need ). Kondisi ini pula yang dikemudian hari sering terdengar dimana terjadi kehamilan yang tidak direncanakan. Disisi lain, juga terdapat PUS yang masih belum terjamah program KB.

Menyikapi hal ini, Pemerintah kemudian melakukan sosialisasi yang cukup gencar. Ini terlihat dari pemanfaatan berbagai media, baik media cetak, papan reklame, ataupun media elektronik seperti iklan-iklan KB di televisi dengan slogan-slogan yang pernah disampaikan seperti “dua anak cukup”, “dua anak lebih baik”, hingga “dua anak cukup, empat terlalu” yang bertujuan agar informasi KB bisa sampai kepada masyarakat dan semakin banyak masyarakat yang tertarik dan ikut program KB. Namun, slogan-slogan KB sendiri masih banyak dipermainkan oleh masyarakat yang mengartikan KB sebagai Keluarga Besar, dan slogan KB diplesetkan menjadi “dua anak lebih, itu baik”.<sup>6</sup>

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi pihak penting yang harus dimaksimalkan dalam menyampaikan informasi KB secara langsung kepada masyarakat. Petugas Lapangan KB atau yang juga dikenal sebagai Penyuluh KB dan juga Petugas Pembina KB Kelurahan/Desa merupakan perpanjangan tangan Pemerintah yang ada disetiap kecamatan dan menjadi kelompok terdepan dalam

---

<sup>6</sup> Pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKKBN, Sudibyo Alimoeso, (Okezone, “BKKBN: 2 Anak Cukup, 4 Terlalu” ) Senin, 08 April 2013 diakses dalam [m.okezone.com/read/2013/04/08/337/787973/](http://m.okezone.com/read/2013/04/08/337/787973/) diakses tanggal 25 Agustus 2013 pukul 12:50 wib.

mengayomi masyarakat untuk berpartisipasi sebagai akseptor aktif. PPLKB melakukan koordinasi kegiatan operasional program KB di wilayah Kecamatan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala BKKBN kabupaten/kota. Koordinator Petugas Lapangan KB disebut Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB).

Jumlah PPLKB di Indonesia sendiri masih belum maksimal dimana rasio jumlah PPLKB terhadap jumlah kecamatan di Indonesia hanya sebesar 0,97.<sup>7</sup> Artinya, masih terdapat Kecamatan yang tidak memiliki PPLKB. Sementara itu rasio Petugas Lapangan hanya 0,47 yang artinya satu petugas membawahi 2-3 Kelurahan/Desa. Idealnya, satu orang Petugas Lapangan membina satu atau maksimal dua Kelurahan/Desa.<sup>8</sup> Namun demikian, jumlah tersebut masih belum tersebar secara merata.

Propinsi Sumatera Barat sendiri termasuk dalam Propinsi yang memiliki jumlah Petugas KB tinggi di Indonesia. Rasio PPLKB mencapai 1,23 dan rasio Petugas Lapangan mencapai angka 1,47 yang artinya satu kecamatan terdapat 1-2 orang PPLKB dan setiap kelurahan dibina oleh satu sampai dua orang Petugas Lapangan.

**Tabel 1.2 Jumlah PPLKB dan Petugas Lapangan KB di Sumatera Barat tahun 2012**

Jumlah PPLKB	Rasio terhadap jumlah Kecamatan	Petugas Lapangan		Rasio terhadap jumlah Kelurahan/Desa
		PLKB/PKB	Petugas KB desa	
226	1,23	437	1.256	1,47

Sumber : Laporan BKKBN Data Potensi Wilayah Program KKB Nasional Tahun 2012

<sup>7</sup> BKKBN, Laporan Umpan Balik Hasil Pelaksanaan Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Potensi Wilayah Program KKB Nasional Tahun 2012.

<sup>8</sup> Keputusan Kepala BKKBN tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Nomor 55/HK-010/B5/2010.

Namun demikian, dari jumlah keseluruhan Tenaga Lapangan KB hanya 40,15% Petugas Lapangan yang sudah mengikuti pelatihan wajib tenaga lapangan.<sup>9</sup> Hal ini tentu akan mempengaruhi kualitas petugas pada saat di lapangan sehingga berpotensi besar tidak tersampainya informasi KB secara baik.

Berdasarkan data BKKBN Propinsi Sumatera Barat, sebagai perwakilan BKKBN yang ada di Propinsi, tercatat sebanyak 626.414 akseptor KB aktif dari 806.173 PUS. Jumlah ini secara angka cukup baik dimana presentase Akseptor KB mencapai 77,7%. Namun demikian permasalahan laju dan kepadatan penduduk tidak semata teratasi. Menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Barat sebanyak 4.846.909 jiwa.<sup>10</sup> Jika melihat laju pertumbuhan penduduk, Sumatera Barat memang masih di bawah rata-rata nasional, yaitu 1,34 persen per tahun (nasional 1,49 persen). Namun angka fertilitas masih tinggi dimana Total Fertility Rate mencapai 2,9 sementara nasional 2,41 per 1.000 wanita.<sup>11</sup> Kondisi ini tentu akan menghasilkan lonjakan penduduk dalam jumlah yang besar beberapa waktu kedepan jika Pemerintah tidak melakukan upaya lebih maksimal.

Kota Padang, sebagai Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat yang dapat diposisikan sebagai cerminan pelaksanaan program KB di Propinsi ini sudah memperlihatkan jumlah Akseptor KB aktif yang cukup banyak. Namun masih belum dapat dikatakan maksimal. Pada tahun 2012 tercatat jumlah penduduk Kota

---

<sup>9</sup> Ibid, Umpan Balik Hasil Pelaksanaan Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Potensi Wilayah Program KKB Nasional Tahun 2012.

<sup>10</sup> BPS, Hasil Sensus Penduduk tahun 2010.

<sup>11</sup> Ibid

Padang sebanyak 844.316 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,58 persen, jauh di atas rata-rata laju pertumbuhan penduduk nasional 1,49%.<sup>12</sup>

Sementara itu, Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP dan KB) sebagai perwakilan BKKBN yang ada di Kota Padang mencatat hingga tahun 2012 ada sebanyak 133.773 PUS. Dari jumlah tersebut sebanyak 97.215 PUS (72,67%) merupakan akseptor aktif KB yang terdiri dari: 16.057 Pengguna IUD, 3.864 pengguna MOW, 134 pengguna MOP, 3.485 pengguna kondom, 6.644 pengguna implan, 46.703 pengguna suntik, dan 20.327 Pengguna Pil KB. Sementara itu, sekitar 27,33% PUS masih belum berpartisipasi sebagai akseptor KB aktif.

**Tabel 1.3 Jumlah Akseptor KB Aktif Kota Padang Menurut Alat Kontrasepsi per Kecamatan tahun 2012**

No	Kecamatan	Alat Kontrasepsi							Total	PUS
		IUD	MOW	MOP	KDM	IMP	STK	PIL		
1	Padang Selatan	922	328	14	207	920	2,474	932	<b>5,797</b>	<b>8,526</b>
2	Padang timur	1,595	485	18	293	627	4,608	1,479	<b>9,105</b>	<b>13,291</b>
3	Padang Barat	976	319	19	118	111	2,590	910	<b>5,043</b>	<b>6,996</b>
4	Padang Utara	1,069	303	23	209	296	3,241	1,460	<b>6,601</b>	<b>8,606</b>
5	Koto Tengah	2,664	476	21	795	1,427	8,693	4,563	<b>18,839</b>	<b>25,372</b>
6	Naggalo	845	195	10	153	534	3,284	2,300	<b>7,321</b>	<b>9,920</b>
7	Kuranji	2,339	535	20	937	952	8,025	2,799	<b>15,607</b>	<b>20,535</b>
8	Pauh	892	247	0	360	434	2,732	1,646	<b>6,311</b>	<b>9,029</b>
9	Lubuk Kilangan	2,148	291	2	114	431	3,115	972	<b>7,073</b>	<b>10,155</b>
10	Lubuk Bagalung	2,289	553	6	270	516	5,925	2,872	<b>12,431</b>	<b>17,228</b>
11	Bungus	118	132	1	29	396	2,016	395	<b>3,087</b>	<b>4,115</b>
	<b>Jumlah</b>	16.057	3,864	134	3,485	6,644	46,703	20,327	<b>97,215</b>	<b>133,773</b>

Sumber : BPP dan KB Kota Padang tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa alat kontrasepsi jangka pendek masih menjadi pilihan utama bagi para istri. Ini terlihat dari tingginya penggunaan alat

<sup>12</sup> BPS, Hasil Sensus Penduduk 2010 Kota Padang



kontrasepsi suntik dan pil KB untuk istri serta kondom untuk suami. Bahkan, suntik menjadi alat kontrasepsi primadona bagi para istri dengan jumlah penggunaannya lebih kurang setengah dari total jumlah akseptor wanita. Adapun kondom masih menjadi pilihan utama bagi suami dengan jumlah akseptor yang jauh lebih besar daripada MOP.

Jumlah akseptor yang cukup tinggi ini tentu merupakan kesuksesan tersendiri bagi pemerintah. Hal ini juga memperlihatkan kinerja implementor dalam mengajak masyarakat, khususnya PUS untuk ikut KB cukup baik. ini pun terlihat dari pencapaian peserta KB baru di Kota Padang dimana dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan.

**Tabel 1.4 Pencapaian Peserta KB Baru Kota Padang menurut Kecamatan dalam tiga tahun terakhir**

No	Kecamatan	Jumlah		
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Padang Selatan	1.424	2.022	1.809
2	Padang timur	1.788	2.208	2.384
3	Padang Barat	1.130	1.398	1.319
4	Padang Utara	1.373	1.403	1.344
5	Koto Tengah	3.231	3.964	5.505
6	Naggalo	1.499	1.727	1.937
7	Kuranji	1.693	2.511	2.040
8	Pauh	1.338	1.840	2.044
9	Lubuk Kilangan	1.404	2.025	2.314
10	Lubuk Bagalung	2.502	3.787	3.470
11	Bungus	822	841	929
	<b>Jumlah</b>	<b>18.204</b>	<b>23.726</b>	<b>25.095</b>

Sumber : BPMP dan KB Kota Padang

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa setiap tahunnya selama tahun 2010 hingga tahun 2011 terjadi peningkatan pencapaian akseptor KB baru. Berdasarkan data pencapaian di atas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata peserta KB baru selama tiga tahun terakhir ini kurang lebih mencapai 22.341 akseptor. Kecamatan Koto Tengah tercatat sebagai kecamatan dengan pencapaian akseptor KB baru terbanyak selama tiga tahun terakhir yang jumlahnya terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Disisi lain, jumlah PUS tidak ikut KB di Kota Padang yang mencapai 36.657 PUS. Dari jumlah tersebut sekitar 42,6% tidak ikut ber KB meskipun sedang menunda kehamilan (tidak ingin anak segera) dan bahkan sudah tidak menginginkan anak lagi.

**Tabel 1.5 Data PUS tidak peserta KB di Kota Padang tahun 2012**

Kecamatan	PUS yang tidak Peserta KB			Jumlah	Persentase Terhadap PUS (%)
	Hamil	Ingin Anak Segera	Menunda Kehamilan dan Tidak Ingin anak lagi		
Padang Selatan	260	1.203	1.366	2.729	31,97
Padang timur	391	1.962	1.832	4.185	31,48
Padang Barat	192	730	1.031	1.953	27,91
Padang Utara	60	1.105	840	2.005	23,29
Koto Tengah	464	2.750	3.319	6.533	25,75
Naggalo	241	883	1.475	2.599	26,20
Kuranji	264	2.545	2.099	4.928	23,99
Pauh	344	1.374	1.000	2.718	30,10
Lubuk Kilangan	266	1124	1.692	3.082	30,35
Lubuk Bagalung	718	1.960	2.120	4.797	27,84
Bungus	202	239	667	1.128	27,41
<b>Jumlah</b>	<b>3.322</b>	<b>15.865</b>	<b>17.470</b>	<b>36.657</b>	<b>27,40</b>

Sumber : BPP dan KB Kota Padang tahun 2012

Perhatian terhadap PUS yang masih belum ikut KB memang harus menjadi perhatian penting. Berdasarkan data di atas, angka PUS yang sebenarnya ingin menunda anak dan bahkan sudah tidak ingin anak lagi tetapi tidak ikut KB tercatat

paling tinggi dibandingkan tidak ikut KB karena hamil atau menginginkan anak segera. Kondisi ini memperlihatkan masih belum maksimalnya upaya implementor dalam mempengaruhi dan mengajak PUS untuk ikut KB.

Sementara itu kita melihat kecamatan Koto Tangah sebagai kecamatan dengan jumlah Akseptor KB aktif terbanyak di Kota Padang yang mencapai 18.839 dari total 25.372 jumlah PUS. Jumlah PUS di Kecamatan Koto Tangah juga merupakan jumlah terbanyak yang mencapai 25.372 PUS.

Kecamatan Koto Tangah memang tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Padang yakni 165.633 orang atau hampir seperlima dari penduduk Kota Padang yang berjumlah 844.316 orang<sup>13</sup>. Pencapaian Peserta KB Baru Kecamatan Koto Tangah pada tahun 2012 juga tercatat paling tinggi yang mencapai 5.505 PUS. Jumlah pencapaian KB baru di Kecamatan ini lebih dari seperlima dari total jumlah peserta KB baru di Kota Padang pada tahun 2012.

Pelaksanaan program KB di Kecamatan Koto Tangah tentu semakin menarik untuk dikaji mengingat fenomena saat ini meskipun program KB sudah menggunakan azas kesamaan hak antara istri dan suami, tetapi pada kenyataannya istri masih menjadi sasaran utama dan ini terlihat dari jumlah akseptor wanita yang masih terlalu dominan di Kecamatan ini. Jumlah akseptor wanita mencapai 17.823 orang (95,6%) sementara akseptor pria hanya berjumlah 816 orang (4,4%).

Selain itu, jumlah penduduk di Kecamatan Koto Tangah yang paling banyak tentu menuntut implementor agar lebih serius mengingat potensi PUS yang tinggi dan laju pertumbuhan penduduk tentu akan tinggi. Disisi lain, kecamatan ini juga

---

<sup>13</sup> Website Pemko Padang, Jumlah Penduduk Kota Padang tahun 2012 dalam [www.padang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=198&Itemid=58](http://www.padang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=58)

merupakan kecamatan terluas sehingga akan berpotensi menghambat kelancaran program KB jika masyarakat masih kesulitan mengakses program yang dikarenakan jarak/kondisi geografis yang terlalu jauh.

Sementara itu, kinerja implementor disatu sisi tercatat dengan baik yang terlihat dari jumlah akseptor KB yang cukup tinggi. Namun disisi lain masih terdapat keganjilan jumlah akseptor KB dimana dalam tiga tahun terakhir terus terjadi peningkatan pencapaian akseptor KB baru dengan rata-rata 4.233 PUS setiap tahunnya. Sementara itu, berdasarkan data tahun 2011 dan 2012 hanya terjadi penambahan 547 PUS setiap tahunnya. Pada tahun 2012, jumlah PUS yang belum ikut KB hanya 6.533 orang lagi. Jika setiap tahun terjadi penambahan 547 PUS maka pada tahun 2013 ada sekitar 7.080 PUS yang belum ikut KB dan pada tahun 2014 total ada sekitar 7.627 PUS belum ikut KB. Jika melihat kinerja pada tahun 2010-2012 tersebut, maka dipastikan pada tahun 2014 seluruh PUS akan tercatat menjadi akseptor KB. Kondisi ini tentu harus dicari tahu lebih lanjut apakah hal ini memang benar karena upaya implementor atau terjadi ketidakakuratan data oleh implementor.

Berdasarkan kondisi di atas, maka penelitian ini akan berusaha mendeskripsikan bagaimana sebenarnya Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat. Dengan melihat implementasi kebijakan, secara tidak langsung penelitian ini diharapkan akan mampu melihat bagaimana program Keluarga Berencana diimplementasikan demi upaya menciptakan keluarga Indonesia dengan memberikan kesadaran akan kesehatan reproduksi dan menjadikan mereka sebagai subjek program tanpa menghilangkan hak asasi pasangan suami istri.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memfokuskan permasalahan pada:

Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mendeskripsikan Implementasi program KB di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu kebijakan publik serta sebagai satu penerapan konsep dan teori yang berhubungan dengan implementasi kebijakan publik.
2. Sebagai bahan referensi dari peneliti lain yang akan melakukan analisis atau kajian dengan permasalahan yang serupa.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Memberikan masukan dalam meningkatkan kinerja Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) dan Penyuluh KB atau PPLKB di Kecamatan Koto Tangah khususnya, serta Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang umumnya.